



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Governansi Kolaboratif Dalam Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya Wilayah
Selatan

Skripsi

Oleh

Andromeda Arizal Fathano

2015310013

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Governansi Kolaboratif Dalam Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya Wilayah
Selatan**

Skripsi

Oleh

Andromeda Arizal Fathano

2015310013

Pembimbing

Dr. Ulber Silalahi, M.A

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Andromeda Arizal Fathano
Nomor Pokok : 2015310013
Judul : Governansi Kolaboratif Dalam Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya Wilayah
Selatan

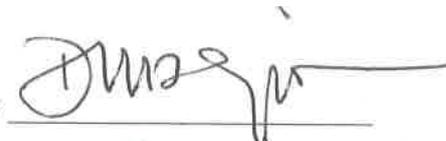
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jum'at 11 Januari 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

: 

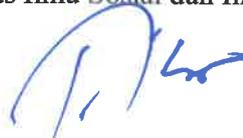
Sekretaris
Dr. Ulber Silalahi, M.A

: 

Anggota
Hubertus Hasan Ismail, Drs. M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andromeda Arizal Fathano

NPM : 2015310013

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Governansi Kolaboratif Dalam Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya Wilayah Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian akademik yang berlaku

Penyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2019

Andromeda Arizal Fathano

ABSTRAK

Nama : Andromeda Arizal Fathano

NPM : 2015310013

Judul : Governansi Kolaboratif Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya Wilayah Selatan

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya indikasi permasalahan dalam perumusan kesepakatan kolaborasi yang disebabkan oleh ketidakpercayaan beberapa *stakeholders* dalam penentuan tarif awal penyediaan air bersih yang menyebabkan keterlambatan pembangunan SPAM Regional Wilayah Bandung Selatan. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan mengalami keterlambatan karena adanya masalah dalam proses kolaborasi terutama dalam perumusan kesepakatan untuk kolaborasi

Penelitian ini membahas kolaborasi melalui teori proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Thomson dan Perry. Terdapat 5 dimensi dari proses kolaborasi yang dikaji dalam penelitian ini, diantaranya adalah dimensi 1) tata kelola, 2) administrasi, 3) otonomi organisasi, 4) mutualitas, dan 5) kepercayaan. Selain itu juga penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana aspek pendukung seperti kepercayaan, komitmen, legitimasi, dan perencanaan yang baik serta dalam kolaborasi ini pula memiliki faktor penghambat seperti perbedaan visi dan misi, sumberdaya, dan budaya dari sebuah proses kolaborasi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus dengan tipe deskriptif. dimana data dikumpulkan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam, dan penelitian kepustakaan melalui studi dokumentasi. Peneliti dalam menyajikan analisis masalah menggunakan acuan dari Miles dan Huberman yaitu teknik reduksi data, display data dan verifikasi data. Dalam menjelaskan pembahasan peneliti menggunakan analisis realis-kritis dengan pengujian kualitas data kualitatif berdasarkan Vincent A. Anfar dengan 7 strategi pengujian *Prolonged Engagement, Triangulation, Peer Debriefing, Member Checks, External Audit, Negative Case Analysis, Thick Description*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan 1) belum adanya sanksi yang tegas ketika pihak kolaborator melanggar perjanjian 2) tidak terdapat pula sanksi jika kolaborator tidak menjalankan pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan sesuai jadwal yang ditetapkan, 3) belum adanya pemantauan dari masing-masing pihak secara langsung. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa aspek yang menghambat terjadinya kolaborasi ini yaitu perbedaan Sumber Daya Manusia, ketidakpercayaan, dan beban target yang tidak sesuai.

Kata Kunci : Kolaborasi, Penyediaan Air Bersih, Sistem Penyediaan Air Bersih

ABSTRACT

Name : Andromeda Arizal Fathano

NPM : 2015310013

Title : Collaborative Governance in the Development of the Southern Bandung Regional Water Supply System

This research is motivated by indications of problems in the formulation of collaborative agreements caused by distrust of several stakeholders in determining the initial tariff for the supply of clean water which has caused delays in the construction of the South Bandung Regional Regional SPAM. Based on preliminary observations it is known that the development of the Bandung Raya Selatan Regional SPAM has been delayed due to problems in the collaboration process, especially in formulating agreements for collaboration

This research discusses collaboration through the collaborative process theory proposed by Thomson and Perry. There are 5 dimensions of the collaboration process studied in this study, including dimensions 1) governance, 2) administration, 3) organizational autonomy, 4) mutuality, and 5) trust. In addition, this study explains how supporting aspects such as trust, commitment, legitimacy, and good planning and collaboration also have inhibiting factors such as differences in the vision and mission, resources, and culture of a collaborative process.

The method used in this study is qualitative, with a case study research strategy with descriptive type. where data is collected by means of field research through observation and in-depth interviews, and library research through documentation studies. Researchers in presenting problem analysis use references from Miles and Huberman, namely data reduction techniques, data display and data verification. In explaining the discussion, researchers used realist-critical analysis by testing qualitative data quality based on Vincent A. Anfara with seven Prolonged Engagement testing strategies, Triangulation, Debriefing Peers, Member Checks, External Audit, Negative Case Analysis, Thick Description

The results of this study indicate that the collaboration carried out by the West Java Provincial Government and Bandung City Government has not gone well. This is because 1) there is no strict sanction when collaborators violate the agreement 2) there is no doubt if collaborators do not carry out the development of the Bandung Raya Selatan Regional SPAM according to the set schedule, 3) there is no direct monitoring from each party. This happens because there are several aspects that hinder the occurrence of this collaboration, namely differences in Human Resources, distrust, and inappropriate target loads.

Keywords: Collaboration, Clean Water Supply, Clean Water Supply System.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Governansi Kolaboratif Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bandung Raya Wilayah Selatan” dengan lancar.

Pertama-tama peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua peneliti, terimakasih atas doa, motivasi dan kasih sayang yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Bapak Ulber Silalahi, M.A, selaku dosen pembimbing peneliti. Terimakasih atas bantuan, kesabaran, dan waktunya dalam membimbing peneliti hingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini secara maksimal, *you have not been just a lecturer who has helped me graduate and get a degree but you also have been a mentor who has helped me become the person that I wanted to be, thank you Pak!*

Dalam kesempatan ini pula peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Tutik Rachmawati S.IP., MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

4. Kepala Perwakilan, Asisiten, dan seluruh staf PDAM TIRTAWENING, BAPPELITBANG, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung, Disperkim Jawa Barat, BAPPEDA, dan Sekretariat Provinsi Jawa Barat, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam membantu peneliti penyusun penelitian ini.
5. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Aurora Alfa dan Alvin Artura yang selalu mendoakan peneliti dan memotivasi peneliti agar menjadi seseorang yang lebih baik disetiap harinya.
6. Terimakasih juga kepada Widhyana Vanrilla yang selalu mendorong dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
7. EKSELII OSIS Angkatan 42 beserta seluruh jajaran yang selama perkuliahan selalu ada dan bersedia main kemanapun dan dimanapun
8. MBHKNG sekumpulan teman sepanjang masa pekuliahan yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah peneliti tentang apapun, kapanpun dan dimanapun.
9. Mahmud, teman semenjak masa SMA yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dari dulu hingga kini.
10. Achram, teman sejak bangku perkuliahan yang selalu memberikan semangat dan dorongannya sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini 3,5 tahun
11. Teman-teman yang tidak henti menghibur dan memberikan motivasi kepada peneliti Akmal, Fadil, Harry Mahardika, Geusan Wira, Rifqi

Maulana, Aldee, Uwa, Arman, Delpiero, Abbie, Ezra, Atuy, Gaffin, Riki
dan Willy

12. Anggota dan jajaran Kabinet LKM 2016-2017

13. HMPSIAP 2017-2018

14. ADVANCE AKADIRA DAN ADIVARA

15. Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, dan 2017 terimakasih telah memberikan cerita dan pengalaman yang
baru di dalam hidup peneliti.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah
membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Words can't describe how thankful I am to have you all!

Peneliti sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu
peneliti terbuka akan adanya kritik dan saran terhadap skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
DAFTAR ISI TABEL.....	viii
DAFTAR ISI GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Maksud Penelitian.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Kegunaan Penelitian.....	13
1.5.1 kegunaan Akademis.....	13
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	13
BAB II RANCANGAN PENELITIAN.....	14
BAB III KERANGKA TEORITIK.....	19
3.1 Penelitian Terdahulu.....	19
3.2 Konsep Kolaborasi dalam Konteks Administrasi Publik.....	22
3.3 Konsep Kolaborasi.....	24
3.4 Proses Kolaborasi.....	27
3.4.1 Tata Kelola (Governance).....	30
3.4.2 Administrasi.....	30
3.4.3 Otonomi Organisasi.....	31
3.4.4 Mutualitas.....	32
3.4.5 Norma Kepercayaan.....	32
3.5 Konsep Kerjasama Antar Pemerintah dalam Konteks Kolaborasi.....	35
3.6 Model Konseptual.....	39
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN.....	43
4.1 Tipe Penelitian.....	43
4.2 Peran Peneliti.....	47
4.3 Sumber Data.....	47
4.5 Teknik Penentuan Informan.....	49
4.6 Teknik Pengumpulan data.....	51
4.7 Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data.....	55
4.8 Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif.....	61

4.8.1 Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	62
4.8.2 Transferabilitas (<i>Transferability</i>).....	63
4.8.3 Dependabilitas (<i>Dependability</i>)	63
4.8.4 Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>)	64
4.9 Strategi-Strategi Validasi Penelitian	65
4.9.1 Prolonged Engagement	65
4.9.2 Triangulation.....	66
4.9.3 Peer Debriefing	68
4.9.4 Negative Case Analysis	68
4.9.5 Member Checking.....	68
4.9.6 Thick Description.....	69
4.9.7 External Audit.....	69
BAB V HASIL ANALISIS DATA DAN TEMUAN.....	70
5.1 Proses Kolaborasi.....	71
5.2 Tata Kelola.....	71
5.3 Administrasi	83
5.4 Otonomi Organisasi	93
5.5 Mutualitas	99
5.6 Kepercayaan.....	107
5.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Kolaborasi.....	112
5.7.1 Faktor Penghambat Proses Kolaborasi	112
5.7.2 Faktor Pendukung Proses Kolaborasi	114
5.8 Menguji Kualitas Penelitian.....	115
5.8.1 Kredibilitas.....	117
5.8.2 Transferabilitas	126
5.8.3 Dependabilitas.....	128
5.8.4 Konfirmabilitas	130
BAB VI PEMBAHASAN.....	132
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	155
7.1 Kesimpulan	155
7.2 Rekomendasi.....	157
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN.....	164

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Hak dan Kewajiban Setiap Pihak dalam Kerjasama.....	8
Tabel 4.1 Daftar Informan.....	50
Tabel 5.1 Daftar Informan	70
Tabel 5.2 <i>Display</i> Data Dimensi Tata kelola	79
Tabel 5.3 Hak dan Kewajiban Setiap Pihak Dalam Perjanjian	84
Tabel 5.4 Pembagian Tugas dalam Pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan.....	88
Tabel 5.5 <i>Display</i> Data Dimensi Administrasi	91
Tabel 5.6 <i>Display</i> Data Dimensi Otonomi Organisasi.....	96
Tabel 5.7 <i>Display</i> Data Mutualitas	104
Tabel 5.8 <i>Display</i> Data Kepercayaan.....	109
Tabel 5.9 Strategi dan Dimensi Kualitas Data	117
Tabel 5.10 Rencana Jadwal Penelitian.....	118

DAFTAR ISI GRAFIK

Grafik 1.1 Kebutuhan Air Bersih Wilayah Bandung Raya.....	3
Grafik 1.2 Proyeksi Permintaan Air di Wilayah Bandung Raya	4
Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Kota Bandung dan Standar Kebutuhan Air.....	4
Grafik 3.1 Lingkaran Kepercayaan	33
Grafik 3.2 Kerangka Kerja Kolaborasi	34
Grafik 3.3 Perbedaan Otonomi, Kerjasama, dan Kolaborasi	37
Grafik 3.4 Model Konseptual.....	39
Grafik 4 .1 Langkah Analisis Data.....	57
Grafik 6.1 Anggota Kolaborasi	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kolaborasi merupakan cara efektif untuk mengatasi masalah terbaru pada suatu negara, salah satunya adalah untuk pengelolaan konflik dan resolusi konflik¹. Kolaborasi dapat terjadi ketika berbagai organisasi dengan kepentingan yang berbeda mencoba untuk bekerjasama untuk merumuskan kebijakan maupun mengatasi masalah yang belum terselesaikan oleh organisasi tunggal, yang akan menghasilkan sesuatu bersama-sama melalui usaha bersama, melalui sumberdaya yang ada, pengambilan keputusan bersama, serta kepemilikan hasil akhir bersama, baik itu berupa produk atau jasa². Kolaborasi pula saat ini menjadi pokok penelitian manajemen publik untuk menangani masalah publik yang tidak dapat mereka hadapi sendiri³.

Bagi organisasi publik mengutamakan kepentingan umum untuk menangani masalah publik secara keseluruhan untuk pemeberian pelayanan yang baik merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan tujuan administrasi negara yaitu untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

¹ E. Gadot, *Collaboration Management In Public Administration* (Public Administration Review,2002) 48-49

² R.Agranoff, *Collaborative Public Management New Strategies for Local Governments* (Washington:University Press, 2003), 183.

³ D. Kettl, '*Managing Boundaries in American Administration: The Collaboration Imperative*' *Public Administration Review*, (2006) :12-13

terhadap kepentingan masyarakat. Pemberian pelayanan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang melaksanakan tugas utama melayani publik, selain itu pula merupakan hak yang dapat diperoleh oleh masyarakat yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan maksimal⁴.

Seperti halnya permasalahan pelayanan publik yang dihadapi oleh Kota Bandung yang cukup mendesak yaitu cakupan pelayanan air di Kota Bandung masih dibawah target nasional dan SDGs yaitu 100%. Selain itu, Kota Bandung membutuhkan sumber daya air dari wilayah lain karena jika PDAM Tirtawening Kota Bandung hanya memanfaatkan sumber daya air yang berada diwilayahnya, persediaan air bagi Kota Bandung tidak akan mencukupi, maka dari itu memerlukan sebuah proses kolaborasi.

Membahas mengenai Kawasan Metropolitan Bandung Raya pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.368.900 Jiwa⁵. Banyaknya jumlah penduduk Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di kawasan Metropolitan Bandung Raya. Salah satu faktor pendukung besarnya permintaan air adalah karena bertambahnya penduduk yang ada disuatu wilayah⁶. Dengan melihat dampak dari tidak tersedianya air bersih yang cukup dapat berpengaruh kepada kegiatan manusia khususnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan berdampak juga terhadap kesehatan, maka

⁴ S.Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), 31.

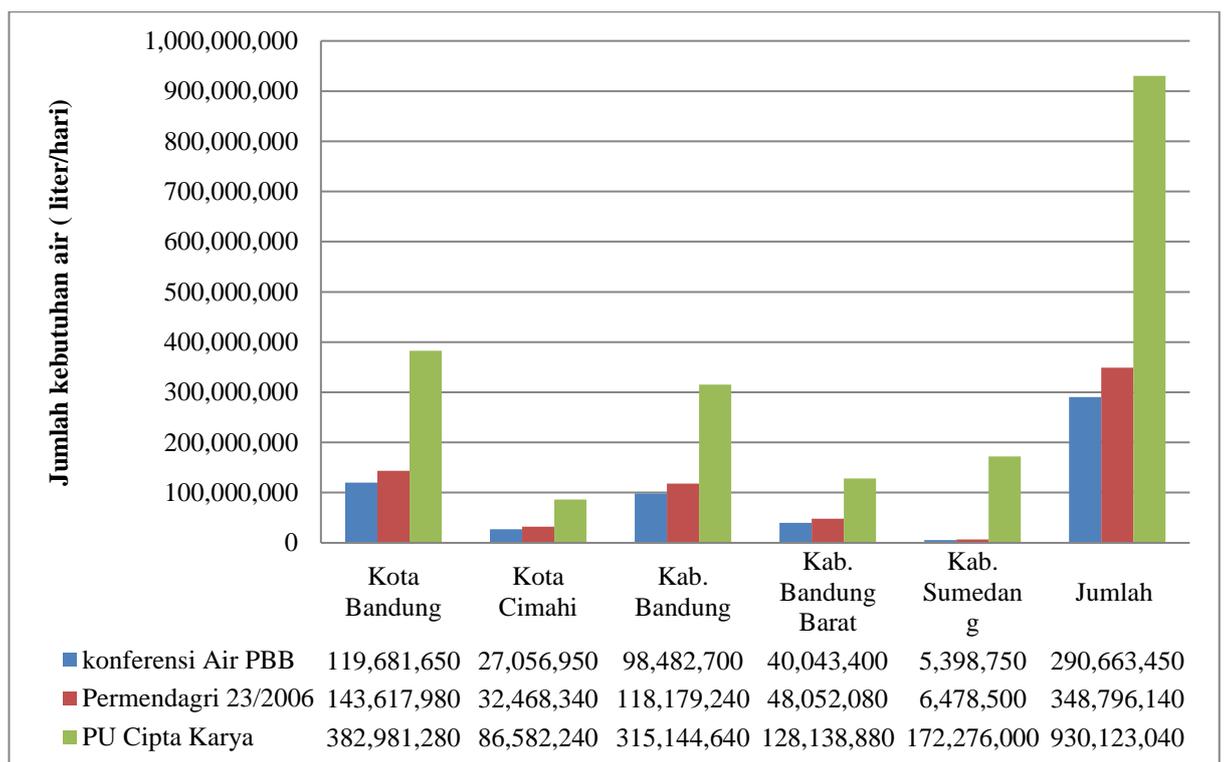
⁵ PUSDALISBANG, 'Jumlah Penduduk Kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2010-2015.' <http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94-Kependudukan.html> (19.9.2018)

⁶ V. Srinivasan, E.F. Lambin, S.M. Gorelick, B.H. Thompson, dan S. Rozelle, 'The Nature And Causes Of The Global Water Crisis: Syndromes From A Meta Analysis Of Coupled Human-Water Studies', *Water Resources Research*, Volume 48 (2012) ,7.

air bersih dapat menjadi isu utama bagi kota dan kabupaten yang berada dikawasan Metropolitan Bandung Raya.

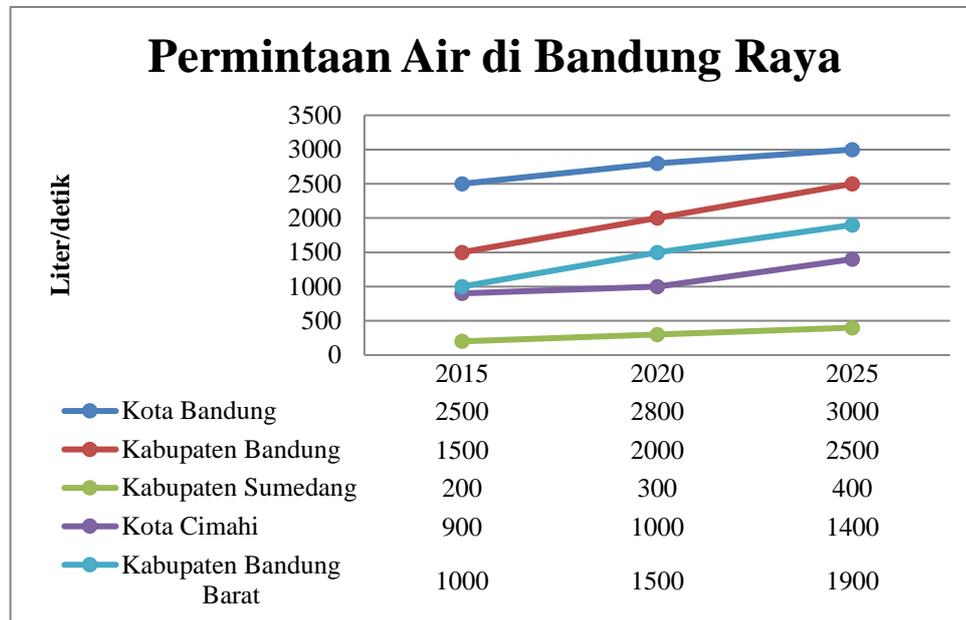
Kota Bandung merupakan kota inti dari wilayah Metropolitan Bandung Raya yang memiliki beberapa kegiatan utama seperti industri kreatif dan teknologi tinggi, perdagangan dan jasa, pariwisata dan transportasi. Dengan semakin berkembangnya suatu wilayah, maka akan semakin bertambah pula kebutuhan air bersih, karena air bersih merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam menunjang berbagai kegiatan disuatu wilayah.

Grafik 1.1 Kebutuhan Air Bersih Wilayah Bandung Raya



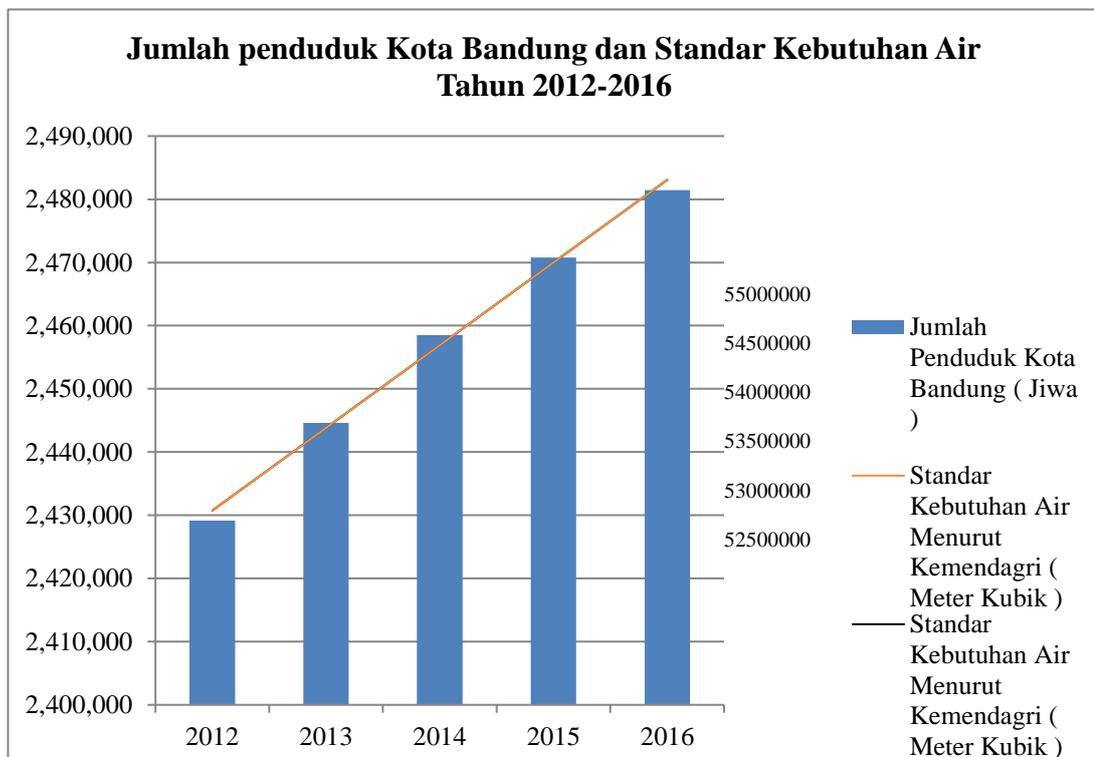
Sumber : Diolah dari WJP-MDM Konsep Awal Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, 2014, p 14

Grafik 1.2 Proyeksi Permintaan Air di Wilayah Bandung Raya



Sumber: Diolah dari PDAM Tirtawening, 2018

Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Kota Bandung dan Standar Kebutuhan Air



Sumber : Diolah dari BP S Kota Bandung 2017

Dari grafik diatas menggambarkan bahwa Kota Bandung sebagai kota inti dari wilayah Metropolitan Bandung Raya memiliki jumlah kebutuhan air dan permintaan air yang lebih tinggi dari kota atau kabupaten lainnya yang berada di wilayah Metropolitan Bandung Raya. Selain karena sebagai pusat kegiatan, tingginya jumlah kebutuhan dan permintaan air di Kota Bandung terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk per tahunnya. Dengan kondisi demikian, maka penulis tertarik untuk memilih Kota Bandung sebagai topik dari penelitian ini.

Dalam kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Kota Bandung memerlukan sebuah proses agar kolaborasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Kegiatan kolaborasi harus memiliki setidaknya tata kelola atau dikenal dengan *Governance* dimana dalam proses kolaborasi ini pemangku kepentingan atau *stakeholders* harus mengerti bagaimana membuat keputusan bersama tentang peraturan yang mengatur perilaku dan hubungan mereka, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Thomson dan Perry⁷. Bahwa tata kelola atau *Governance* dapat berupa pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif, dimana setiap pemangku kepentingan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam kolaborasi, tidak berarti setiap orang harus menyetujui solusi terbaik, namun mereka harus bersedia mendukung keputusan yang telah dibuat.

⁷ A. Thomson, J. Perry, ‘ *Collaboration Processes: Inside the Black Box,*’ *Articles on Collaborative Public Management*, 66 (2006): 23

Kunci keberhasilan dalam kegiatan kolaborasi ini terletak pada sanksi bila ada pihak yang tidak patuh. Pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan, setiap pemangku kepentingan sangatlah diperlukan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, pada awal observasi yang dilaksanakan oleh peneliti. Proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan kolaborasi dilakukan cukup panjang, terutama dalam hal kesepakatan tarif curah⁸. Penentuan tarif ini merupakan hal yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kolaborasi ini. Anggaran dan pembangunan tidak dapat dilaksanakan jika perjanjian kerjasama tersebut belum disetujui oleh pihak-pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* pengembangan SPAM Regional Bandung Raya. Penentuan kesepakatan dalam penentuan tarif ini memerlukan waktu hingga satu tahun.

Pengembangan SPAM Regional ini terbentuk atas perjanjian kerjasama antara beberapa pihak yang pertama adalah Kesepakatan bersama nomor 01/PKS/Dc/2010 119/2192/Bap 119/1469/Adm.Pem.Um 119/882A/Pertasih 119/MoU.72/Hukum/2010 119/1494-Bappeda 180/185-Perj/2010 yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 dan menurut Kepala Sistem Penyediaan Air Minum dan Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri Sekretariat Daerah Jawa Barat kesepakatan ini berlaku selama satu tahun dimana MoU ini kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten

⁸ Wawancara langsung dengan , Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri, tanggal 15 September 2018, pukul 12:30

Bandung, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Kota Cimahi tentang pelaksanaan Pembangunan Infastruktur Air minum.

Dengan adanya MoU tersebut dan perjanjian untuk berkolaborasi yang telah ditandatangani dan disetujui, maka setiap pihak sepakat akan tugas atupun kewajiban dan hak dari masing-masing stakeholders. Meskipun sudah dibentuknya perjanjian ini, dalam pengembangan SPAM Regional tidak memiliki sanksi yang tegas yang dikenakan jika melanggar kesepakatan pengembangan SPAM Regioanl Bandung Raya Selatan. Padahal, sanksi yang tegas merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kolaborasi. Selama ini, pengembangan SPAM Regioal Bandung Raya Selatan ini berjalan karena komitmen dari masing-masing pihak. SPAM Regional Bandung Raya Raya Selatan termasuk kedalam masing-masing kolaborator sehingga ketika tidak tercapai atau terlaksana, maka akan berpengaruh pada kinerja dari masing-masing kolaborator.

Untuk menggerakkan tata kelola atau *governance* diperlukan sebuah administrasi, karena administrasi merupakan dimensi yang cukup kritis dalam kolaborasi hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Thomson dan Perry kunci dari keberhasilan kolaborasi adalah berupa kordinasi, kejelasan peran dan tanggung jawab dimana hal tersebut termuat dalam administrasi⁹. Jika kolaborasi ini dilaksanakan dengan memiliki kejelasan peran dan tanggungjawab juga mekanisme dari pemantauan di laksanakan. Maka, dimensi administrasi dari

⁹ A.Thomson, J. Perry, T. Miller, ' Conceptualizing and Measuring Collaboration', Journal of Public Aministration Reasearch and Theory, 19 (2007) : 26

kolaborasi dalam peningkatan air bersih bagi penduduk Kota Bandung melalui SPAM Regional Bandung Raya Raya Selatan akan sukses. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa kegiatan kolaborasi ini dilandaskan pada surat perjanjian yang ada, termuat dalam surat perjanjian tersebut antara hak dan kewajiban dalam perjanjian kolaborasi ini.

Tabel 1.1 Hak dan Kewajiban Setiap Pihak dalam Kerjasama

Pihak Terkait	Hak	Kewajiban
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan pengelolaan SPAM Regional Perkotaan Bandung Raya wilayah Selatan, melalui BUMD yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat b) Melakukan perhitungan besaran Tarif Curah serta menyesuaikan besaran tarif air curah berdasarkan kajian teknis dan pertimbangan kewajaran nilai tarif bersama-sama dengan pihak kedua dan ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan perencanaan berupa Rencana Induk Regional, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis (DED) SPAM Regional Perkotaan Bandung Raya Wilayah Selatan sampai dengan Titik terinterkoneksi Air curah b) Menyediakan lahan sesuai kebutuhan dan menyelesaikan perizinan yang diperlukan untuk konstruksi pengembangan SPAM Regional Perkotaan Bandung Raya Wilayah Selatan.
Pemerintah Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> a) Mendapat alokasi air curah pada tahap 1 sebesar 2001/d dan tahap 2 sebesar 1501/d b) Melakukan perhitungan besaran tarif curah 	<ul style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi dan mendukung pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Wilayah Selatan

	berdasarkan kajian teknis dan pertimbangan kewajaran nilai tarif bersama sama dengan pihak kesatu dan kedua	b) Membeli dan menjamin ketermanfaatnya air curah yang didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahap 1 sebesar 2001/d dan tahap 2 sebesar 1501/d
--	---	---

Namun, meskipun telah tertulis antara hak dan kewajiban setiap kolaborator, tidak disebutkan secara spesifik instansi atau badan manakah yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Begitu pula dengan Kota Bandung yang tidak secara spesifik menyebutkan instansi mana saja yang mengerjakan apa dalam pengembangan SPAM Regional Wilayah Bandung Selatan.

Dalam organisasi pihak yang berkolaborasi, harus mengalami ketergantungan yang saling menguntungkan baik pada kepentingan yang berbeda atau pada kepentingan bersama. Mutualitas merupakan teknik dalam kolaborasi untuk pemecahan masalah yang bersifat win-win yang dapat menangani konflik yang ada dalam kepentingan berbeda¹⁰. Dalam kolaborasi tentu ada ketergantungan satu sama lain. Dalam pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan, terjadi ketergantungan antar pihak-pihak dalam pembagian tugas. Jika salah satu pihak tidak mengerjakan tugasnya maka akan menghambat pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam

¹⁰ *Ibid*, 27

Negeri Sekretariat Daerah Jawa Barat, Jika pemerintah Provinsi Jawa Barat ditugaskan untuk melakukan pembangunan pipa transmisi tepi belum selesai maka Pemerintah Kota Bandung tidak dapat memulai pembangunan pipa JDU. Tidak dilaksanakannya tugas oleh masing-masing *stakeholders* penulis berasumsi bahwasanya terdapat beberapa perbedaan sumber daya, perbedaan sumberdaya ini dikarenakan karena pengalaman dan keahlian yang berbeda.

Melihat beberapa permasalahan mengenai proses dalam kolaborasi diantara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung seperti perihal tata kelola dimana perihal pengambilan keputusan dalam awal perencanaan perjanjian kolaborasi ini cukup lama karena penentuan harga tarif curah air, Penentuan tarif ini merupakan hal yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kolaborasi ini. Anggaran dan pembangunan tidak dapat dilaksanakan jika perjanjian kerjasama tersebut belum disetujui oleh pihak pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* pengembangan SPAM Regional Bandung Raya. lalu permasalahan seperti tidak memiliki sanksi yang tegas jika melanggar kesepakatan pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan. Padahal, sanksi yang tegas merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kolaborasi.

Permasalahan lainnya dalam kolaborasi ini tidak disebutkan secara spesifik instansi atau badan manakah yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas-tugas yang termuat dalam surat keputusan perjanjian kolaborasi dan yang peneliti temukan adalah permasalahan mengenai salah satu pihak kolaborator bila tidak mengerjakan tugasnya maka akan

menghambat pihak lain, hal ini dicontohkan dalam pembangunan pipa transmisi tepi dan pipa JDU.

Permasalahan yang telah disebutkan diatas menurut Stephen P. Osborne dalam buku *The New Public Governance : Emerging Perspective On The Theory And Practice Of Public Governance*¹¹ menjelaskan setidaknya ada beberapa penghambat proses kolaborasi yang dilaksanakan, salah satunya karena beberapa hal yaitu perbedaan sumberdaya, perbedaan tujuan dan visi, pemerintah memberikan tekanan pada proses kolaborasi, kecurigaan dan ketidakpercayaan, lalu perbedaan kultur hal itu lah yang menurut Osborne menghambat terlaksananya kolaborasi.

Hambatan yang terjadi dalam proses kolaborasi ini mengakibatkan target penyelesaian program SPAM Regional Bandung Selatan ini terus mundur dari waktu seharusnya. Pada awalnya, menurut kesepakatan bersama target pengembanaan SPAM ini seharusnya selesai pada tahun 2015, lalu target penyelesaian mundur menjadi tahun 2017. Saat ini pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan sudah sampai pada tahap dimana pembangunan dari provinsi sudah selesai, tinggal menunggu pembangunan yang dilakukan oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung yang ditargetkan selesai pada tahun 2018.

Dengan melihat proses kolaborasi dan permasalahan yang terjadi peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai proses kolaborasi yang

¹¹ S.Osborne, *The New Public Governance : Emerging Perspective on the theory and practice of public governance* (London:Routledge, 2010) 165-169

terjadi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung serta stakeholders apa saja yang terlibat dalam proses kolaborasi ini. Peneliti pula memiliki ketertarikan untuk melihat apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses kolaborasi ini. Maka dari kiranya penting bagi penulis untuk meneliti dan mendalami bagaimana **“Governansi Kolaboratif Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya Wilayah Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

- Bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan peningkatan penyediaan air minum bagi penduduk Kota Bandung ?

1.3 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat sidang sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan penyediaan air bersih bagi penduduk Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 kegunaan Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kolaborasi dan peningkatan penyediaan air minum.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh kelulusan di program studi Ilmu Administrasi Publik

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanagan pemikiran dan masukan bagi pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan kolaborasi dalam penyediaan air bersih melalui SPAM regional.